



INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER KOTA CIMAHI TAHUN 2012



**Badan Pusat Statistik
Kota Cimahi**



INDEKS PEMBERDAYAAN JENDER KOTA CIMAHI TAHUN 2012

Ukuran Buku : 18 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : 33 halaman

Pengarah : Drs. H. Agus Praptono, M.Stat

Penyunting : Dewi Mulyahati, SSi, ME

Penyusun : Windi Pramudyawardani, SST, MSi

Desain Sampul : Deni Riyadi, SST

Diterbitkan oleh : Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
2014

Kata Pengantar

Menurut hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, penduduk perempuan telah mencapai 49,35 persen dari keseluruhan penduduk Kota Cimahi. Dengan jumlah sedemikian besar, tentunya merupakan suatu keniscayaan untuk tidak hanya melibatkan perempuan sebagai obyek dalam pembangunan melainkan juga sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan perempuan ini tentunya akan sangat mendorong percepatan pembangunan di Kota Cimahi.

Publikasi ini mencoba melihat telah sejauh manakah peran serta perempuan dalam pembangunan di Kota Cimahi melalui suatu ukuran pencapaian pembangunan manusia yang berbasis jender yaitu Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ). Dari indeks ini bisa dilihat partisipasi perempuan dalam parlemen, sebagai tenaga kepemimpinan di berbagai bidang, maupun sumbangan perempuan dalam hal upah.

Semoga publikasi ini dapat memperluas wawasan dan memberikan manfaat bagi masyarakat pengguna data secara umum maupun para pengambil kebijakan. Kritik dan saran demi memperbaiki publikasi ini di masa mendatang sangat kami harapkan.

Cimahi, 4 November 2014

Kepala BPS Kota Cimahi,



Drs. H. Agus Praptono, M.Stat
NIP. 19660802 199401 1001

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Berbagai Konsensus Nasional dan Internasional Tentang Jender	1
Berbagai Konsensus Internasional Tentang Jender	2
Konsensus Jender di Indonesia	4
Alat Pengukur Kesetaraan Jender	6
Perkembangan Pemberdayaan Jender	10
Pencapaian Komponen Pemberdayaan Jender	13
Disparitas Pembangunan Jender di Kota Cimahi	19
Kesenjangan di Bidang Pendidikan	20
Kesenjangan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan	24



Berbagai Konsensus Nasional dan Internasional Tentang Gender

Keluarga menurut UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10 adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami-istri dan anak-anaknya, atau ayah dan anaknya, atau istri dan anaknya (BKKBN, 1992). Sedangkan keluarga sejahtera adalah keluarga yang diikat melalui perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual, bertakwa kepada Tuhan YME, mempunyai hubungan yang harmonis, serasi dan seimbang antar anggota keluarga, antar keluarga dan antara keluarga dan lingkungan. Dari definisi keluarga tersebut tampak bahwa kesejahteraan dalam keluarga membutuhkan adanya hubungan yang seimbang dan setara antar anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan.

Jender berbeda dengan karakteristik laki-laki dan perempuan dalam arti biologis. Pemaknaan jender mengacu pada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dikonstruksikan secara sosial. Perbedaan ini tidak akan menimbulkan persoalan bila disertai dengan keadilan antar keduanya. Akan tetapi

ketidakadilan yang terjadi akan mengakibatkan korban baik bagi kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Oleh karena itu, kesetaraan jender merupakan hak yang semestinya didapatkan agar laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam bidang kehidupan.

Berbagai Konsensus Internasional Tentang Jender

Permasalahan jender telah lama menjadi perhatian dunia dan menyebabkan tumbuhnya berbagai konsensus. Satu momen penting adalah Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women – CEDAW*) pada Tahun 1979. Konvensi ini menyediakan dasar untuk mewujudkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dengan memastikan adanya akses dan kesempatan yang sama dalam kehidupan politik dan publik - termasuk hak untuk memilih dan dipilih - serta pendidikan, kesehatan dan lapangan pekerjaan.

Konvensi ini telah banyak mengubah sudut pandang mengenai perempuan sehingga pada Tahun 1994 diadakan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (*International Conference on Population and Development – ICPD*) di Kairo. Konferensi ini membawa suatu strategi pembangunan baru yang memusatkan perhatian pada terpenuhinya kebutuhan manusia secara individu (*people centered development*) dimana kuncinya adalah pemberdayaan perempuan dan pemberian lebih banyak pilihan kepada mereka melalui perluasan akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, peningkatan keterampilan

dan lapangan pekerjaan (UNFPA, 1994). Pemberdayaan perempuan ini adalah untuk tercapainya sasaran persamaan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, memungkinkan perempuan untuk mewujudkan potensinya, dan melibatkan perempuan sebagai pembuat keputusan dalam segala aspek kehidupan ekonomi, politik dan budaya.

Setahun kemudian, tepatnya 1995, di Beijing diadakan konferensi tingkat dunia mengenai perempuan (*The Fourth World Conference On Women*) dan berhasil mendeklarasikan Landasan Aksi Beijing (*Beijing Platform for Action - BPFA*). Deklarasi yang diikuti oleh Indonesia ini menekankan bahwa kesetaraan dalam pengambilan keputusan sangat penting dalam pemberdayaan perempuan. BPFA juga menyatakan bahwa partisipasi sejajar antara perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan tidak hanya berkaitan dengan keadilan ataupun demokrasi tetapi juga agar keinginan dan kebutuhan perempuan turut diperhatikan. Untuk mencapai tujuan itu BPFA mendeklarasikan program aksi yang meliputi 12 area kritis, yaitu :

- (1) perempuan dan kemiskinan;
- (2) pendidikan dan pelatihan untuk perempuan;
- (3) perempuan dan kesehatan;
- (4) kekerasan terhadap perempuan;
- (5) perempuan dan konflik bersenjata;
- (6) perempuan dan ekonomi;
- (7) perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan;
- (8) mekanisme kelembagaan untuk kemajuan perempuan;
- (9) hak asasi manusia, penghapusan segala bentuk diskriminasi;
- (10) perempuan dan media;
- (11) perempuan dan lingkungan;
- (12) anak perempuan.

Perempuan sedunia tiap tahun berkumpul di Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, untuk melaporkan kemajuan pelaksanaan BPFA di masing-masing negara, saling tukar-menukar pengalaman dan menggalang kerjasama multilateral atau pun bilateral.

Pada tahun yang sama, UNDP dalam publikasi *Human Development Report (HDR)* juga mengangkat tema mengenai jender. Publikasi tersebut menekankan bahwa pembangunan manusia merupakan upaya untuk memperluas pilihan bagi semua masyarakat, bukan hanya salah satu bagian saja dari masyarakat sehingga tidak ada yang terkecualikan. Dalam publikasi tersebut juga tersirat pesan bahwa pengabaian aspek jender akan menghambat proses pembangunan di suatu wilayah.

Selain itu, salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*) atau MDG's pada Tahun 2015 adalah mendorong kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan. Deklarasi yang telah disepakati oleh 189 negara anggota PBB pada Tahun 2000 tersebut menjadi bukti keprihatinan negara-negara di dunia terhadap permasalahan ketidakadilan jender yang terutama kerap menimpa kaum perempuan.

Konsensus Jender di Indonesia

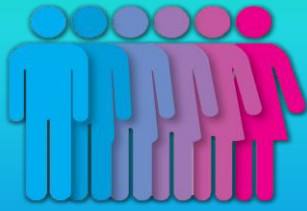
Bagi masyarakat Indonesia, kesetaraan atau kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan bukanlah hal baru. Pemerintah pusat memiliki komitmen kuat terhadap masalah jender dan kebijakan penyetaraan serta persamaan hak bagi seluruh rakyat sebagaimana termaktub dalam

Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sebagai salah satu upaya memperjuangkan hak-hak perempuan, pada Tahun 1978 dibentuklah Menteri Muda Urusan Peranan Wanita yang ditingkatkan statusnya menjadi Menteri Negara Urusan Peranan Wanita pada Tahun 1983. Pada Tahun 1998, namanya kembali diubah menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pada Tahun 1995, tepat pada Hari Ibu, Presiden RI telah mencanangkan kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan sebagai gerakan nasional. Dikatakan bahwa : "Dengan kemitrasejajaran pria dan wanita yang harmonis, kita bangun bangsa Indonesia yang maju dan sejahtera lahir dan batin". Kemitrasejajaran perempuan dan laki-laki merupakan kesepakatan nasional yang harus mewarnai seluruh kehidupan bangsa.

Berbagai regulasi juga telah dikeluarkan Pemerintah Indonesia untuk mendukung upaya penyetaraan dan persamaan hak setiap warga negara. Misalnya UU No 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, yang disahkan untuk mendukung hasil CEDAW, dan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pada Tahun 2000 pemerintah bahkan mengeluarkan INPRES No. 9 tentang Pengarusutamaan Jender yang bertujuan untuk menurunkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki Indonesia dalam mengakses dan memperoleh manfaat pembangunan serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. Penerapan pengarusutamaan jender akan dapat menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.



Alat Pengukur Kesetaraan Jender

P

ada Tahun 1995, dalam publikasi *HDR*-nya, UNDP memperkenalkan suatu indeks untuk mengukur pembangunan jender di suatu wilayah yaitu *Gender Development Index* (Indeks Pembangunan Jender/IPJ) dan *Gender Empowerment Measure/GEM* (Indeks Pemberdayaan Jender/IPJ). Kedua ukuran ini diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan jender yang dicapai melalui berbagai program pembangunan.

Pencapaian pembangunan manusia secara kuantitatif dapat dilihat dari besaran IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau *HDI* (*Human Development Index*) yang merupakan gabungan dari indikator kesehatan, pendidikan dan daya beli. Namun besaran angka IPM semata tidak dapat menjelaskan seberapa besar perbedaan (*gap*) pencapaian kualitas hidup perempuan dan laki-laki. Melalui IPJ, perbedaan pencapaian yang menggambarkan kesenjangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dapat terjelaskan, yakni dengan mengurangkan nilai IPM dengan IPJ.

Sementara itu, IDJ dapat menggambarkan perbedaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam pencapaian kapabilitas dan pengambilan keputusan.

IDJ dibentuk dari tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDJ sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen pembentuknya.

Untuk menghitung IDJ terlebih dahulu dihitung EDEP (*the equally distributed equivalent achievement*) untuk setiap komponen, yang merupakan indeks pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata. Selanjutnya masing-masing indeks komponen dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok jender untuk semua komponen IDJ. Adapun proses penghitungannya adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$EDEP_{par} = [P_f X_f^{-1} + P_m X_m^{-1}]^{-1}$$

dimana :

- X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen
- X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen
- P_f = proporsi penduduk perempuan
- P_m = proporsi penduduk laki-laki

$$I_{par} = \frac{EDEP_{par}}{50}$$

2. Penyusunan indeks pengambilan keputusan (I_{DM})

$$EDEP_{DM} = [P_f Y_f^{-1} + P_m Y_m^{-1}]^{-1}$$

dimana :

- Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional
 Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional
 P_f = proporsi penduduk perempuan
 P_m = proporsi penduduk laki-laki

$$I_{DM} = \frac{EDEP_{DM}}{50}$$

3. Penyusunan indeks distribusi pendapatan (I_{DisInc})

Khusus untuk komponen indeks distribusi pendapatan dihitung dengan tahapan sebagai berikut :

- i. Menghitung rasio upah perempuan terhadap upah laki-laki di sektor non pertanian (W_f)
- ii. Menghitung upah rata-rata (W) dengan rumus :

$$W = AEC_f(W_f) + AEC_m$$

dimana :

- AEC_f = proporsi tenaga kerja perempuan (aktif secara ekonomi)
 AEC_m = proporsi tenaga kerja laki-laki (aktif secara ekonomi)
 W_f = rasio upah perempuan di sektor non pertanian

- iii. Menghitung rasio upah masing-masing jenis kelamin terhadap upah rata-rata W (R)
- iv. Menghitung sumbangan pendapatan ($IncS$) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$INCS_{(f/m)} = AEC_{(f/m)} \cdot R_{(f/m)}$$

- v. Menghitung proporsi sumbangan pendapatan ($PINCS$) untuk masing-masing jenis kelamin dengan rumus :

$$\text{PINCS}_{(f/m)} = \frac{\text{INCS}_{(f/m)}}{P_{(f/m)}}$$

- vi. Menghitung EDEP_{Inc} dengan rumus :

$$\text{EDEP}_{\text{INC}} = [P_f \cdot \text{PINCS}_f^{-1} + P_m \cdot \text{PINCS}_m^{-1}]^{-1}$$

- vii. Menghitung indeks sumbangan pendapatan (I_{DisInc}) dengan rumus :

$$I_{\text{DisInc}} = \frac{(\text{EDEP}_{\text{INC}} \cdot \text{PPP}) - \text{PPP}_{\text{min}}}{\text{PPP}_{\text{maks}} - \text{PPP}_{\text{min}}}$$

dimana :

4. Penyusunan IDJ

$$\text{IDJ} = \frac{I_{\text{par}} + I_{\text{DM}} + I_{\text{DisInc}}}{3}$$

Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi baik bersifat langsung maupun tidak langsung dari berbagai program dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasilnya, indeks ini akan menggambarkan kondisi perempuan sehubungan dengan peranannya di berbagai bidang.



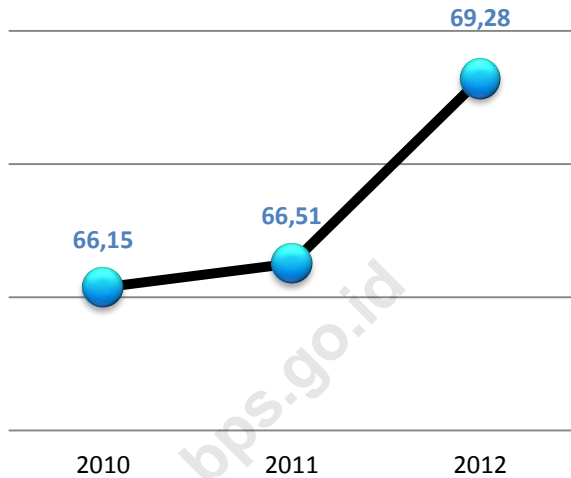
Perkembangan Pemberdayaan Jender

Kesetaraan dan keadilan jender bisa dimaknai sebagai suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis, tanpa ada salah satu kelompok yang merasa dirugikan atau dimarjinalkan. Kesenjangan jender tidak hanya merujuk pada persoalan persamaan status dan kedudukan antara laki-laki dan perempuan tetapi bisa juga bermakna pada persoalan persamaan peranan.

Indeks Pemberdayaan Jender merupakan sebuah ukuran komposit yang terkait dengan jender yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan jender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan jender.

Gambar 3.1

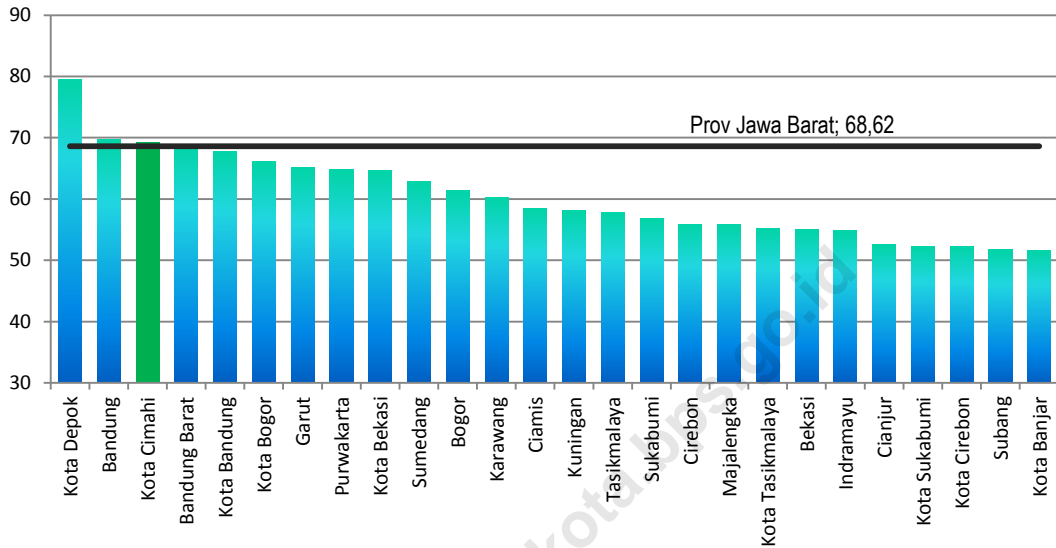
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) Kota Cimahi, 2006-2012



Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2004-2011, BPS & Kementerian PPPA

Gambar 3.1 menggambarkan tren IDJ Kota Cimahi sejak Tahun 2010 yang stabil di atas nilai 60. Hingga Tahun 2012 indeks ini terus menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2010 IDJ Kota Cimahi mencapai nilai 66,15. Setelah itu tetap menunjukkan kenaikan dan mencapai 69,28 pada Tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa peranan perempuan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan ekonomi semakin meningkat. Dengan kata lain, terjadi peningkatan kesetaraan dalam hal partisipasi dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik maupun penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial khususnya kontribusi perempuan dalam pendapatan rumah tangga.

Pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai nilai IDJ Kota Cimahi akan didapatkan dengan membandingkan nilai IDJ tersebut terhadap kabupaten atau kota lain di Provinsi Jawa Barat. Lampiran 1 menyajikan angka kabupaten/kota secara lengkap, sedangkan untuk lebih memudahkan interpretasi, IDJ kabupaten/kota disajikan dalam bentuk grafik pada Gambar 3.2 di bawah.

**Gambar 3.2.**

IDJ Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, 2012

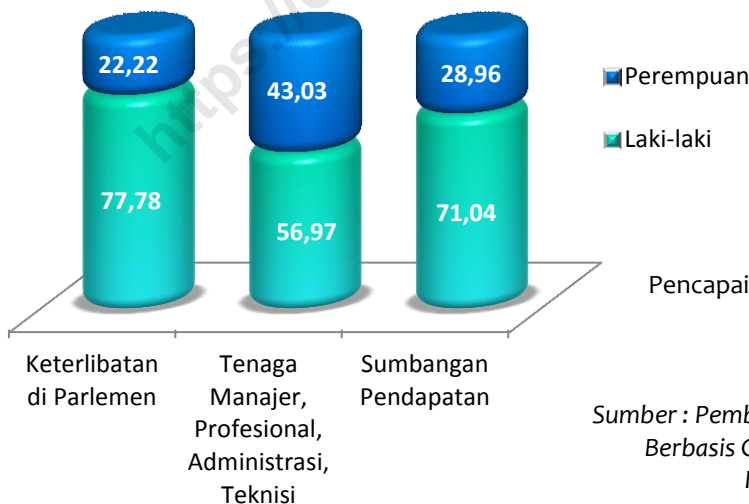
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, BPS & Kementerian PPPA

Pada Tahun 2012, Kota Cimahi menduduki peringkat ketiga dalam capaian pemberdayaan jender di wilayah Provinsi Jawa Barat. Posisi pertama diraih oleh Kota Depok yang mencapai IDJ sebesar 79,55. Angka ini jauh meninggalkan kabupaten/kota lain yang memiliki IDJ dibawah 70. Kabupaten Bandung menempati posisi kedua dengan indeks sebesar 69,64, tidak jauh dari Kota Cimahi. Peringkat terakhir diduduki oleh Kota Banjar dengan indeks sebesar 51,67. Nilai ini tidak terpaut jauh dari Kabupaten Subang yang memiliki indeks sebesar 51,75.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, maka perlu dikaji setiap komponen IDJ dan perkembangannya.

Pencapaian Komponen Pemberdayaan Jender

Berdasarkan Gambar 3.3, secara umum capaian komponen IDJ pada Tahun 2012 untuk perempuan masih lebih rendah daripada laki-laki. Hal ini terjadi di semua komponen baik dalam partisipasi politik, pengambilan keputusan, maupun dalam perekonomian. Masih relatif rendahnya capaian perempuan jika dibandingkan laki-laki bisa disebabkan oleh dua hal. Pertama, bahwa pembangunan yang selama ini dilakukan lebih banyak menguntungkan laki-laki; dan yang kedua, pembangunan manusia telah memberikan kesempatan kepada semua penduduk tanpa kecuali, tetapi kesempatan ini tidak digunakan secara optimal oleh kelompok lain (dalam hal ini perempuan). Hal ini memberikan kesan bahwa perempuan selalu termarginalkan.



Gambar 3.3
Pencapaian Komponen IDJ
Kota Cimahi, 2012

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, BPS & Kementerian PPPA

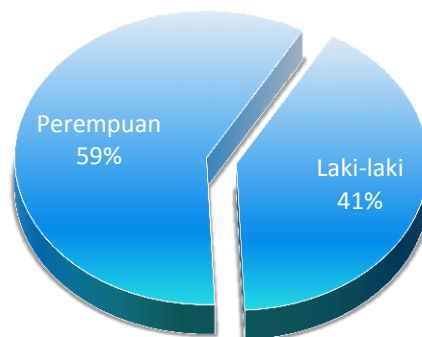
➤ Keterwakilan Perempuan Dalam Pemerintahan

Dari sisi keterwakilan dalam parlemen, tampaknya masih banyak yang harus dilakukan untuk mencapai kesetaraan jender. Pada Tahun

2012 perempuan hanya menduduki 22,22 persen kursi yang ada di parlemen. Nilai ini masih dibawah kuota yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2003, yang menyebutkan bahwa kuota perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam politik sekitar 30 persen. Apabila kuota perempuan yang telah diatur dalam UU tersebut mampu dicapai secara optimal, tentu akan membawa dampak yang positif dalam pemberdayaan perempuan mengingat kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih memperhatikan isu-isu jender.

Bila membandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Barat, capaian Kota Cimahi termasuk cukup baik karena menduduki tempat ketiga dalam hal persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen. Hal ini dapat dilihat pada **Lampiran**. Capaian tertinggi adalah Kota Depok sebesar 38 persen yang menjadi satu-satunya kabupaten/kota yang telah memenuhi kuota minimal dalam UU No. 12 Tahun 2003. Di tempat kedua adalah Kabupaten Purwakarta yang capaiannya sebesar 24,44 persen. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, keterwakilan perempuan ini mencapai 24,00 persen dari seluruh anggota parlemen tingkat provinsi.

Gambar 3. 4
Komposisi PNS Kota Cimahi
Menurut Jenis Kelamin, 2012

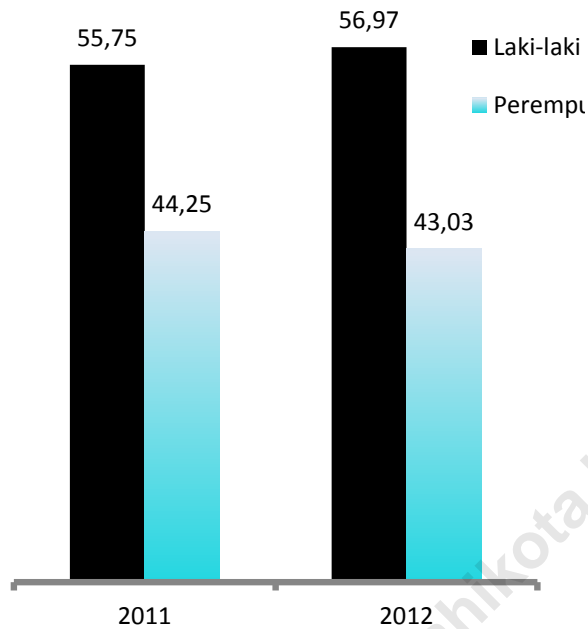


Sumber : Badan Kepegawaian
Daerah Kota Cimahi

Meskipun dalam parlemen keterwakilan perempuan masih terbilang kecil, namun dari sisi jumlah pegawai negeri sipil (PNS) tampak bahwa PNS perempuan Kota Cimahi justru lebih banyak dari PNS laki-laki. Hal ini tampak pada Gambar 3.4 di atas. Hal ini mengindikasikan bahwa tampaknya relatif tidak terjadi diskriminasi jender dalam penerimaan pegawai negeri sipil Kota Cimahi melihat formasi PNS di atas. Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang positif untuk mengawali langkah menuju keadilan dan kesetaraan jender.

➤ **Tenaga Manajer, Profesional, Administrasi, dan Teknisi**

Indikator lain yang juga digunakan dalam mengukur indeks komposit IDJ yaitu persentase perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, kepemimpinan, dan teknisi. Indikator ini menunjukkan peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, kehidupan ekonomi dan sosial. Keterlibatan perempuan di posisi ini memberikan gambaran kemajuan Terhadap peranan perempuan, mengingat selama ini perempuan hanya dipandang sebagai makhluk berurusan dengan pekerjaan rumah tangga. Sesungguhnya perempuan memiliki potensi yang sama baiknya dengan laki-laki, hanya perempuan kurang memiliki kesempatan karena terbentur oleh persoalan budaya serta kodrat yang melekat terkait dengan fungsi-fungsi reproduksi. Pada umumnya, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, swasta, dan organisasi sosial lainnya masih kecil mengingat masih terbatasnya perempuan sebagai tenaga profesional, kepemimpinan/ manajerial, administrasi, serta teknisi.



Gambar 3.5
Tenaga Manajer, Profesional,
Administrasi dan Teknisi Kota
Cimahi Menurut Jenis Kelamin
(%), 2011-2012

Sumber : Pembangunan Manusia
Berbasis Gender 2012 dan 2013,
BPS & Kementerian PPPA

Gambar 3.5 di atas menunjukkan bahwa di Kota Cimahi, tak jauh berbeda dengan komponen sebelumnya, komponen ini juga menunjukkan capaian perempuan yang telah cukup baik kendati pun masih sedikit lebih rendah daripada laki-laki. Meskipun demikian persentase perempuan sebagai tenaga profesional pada Tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2011. Bila pada 2011 44,25 persen dari tenaga profesional adalah perempuan maka pada Tahun 2012 persentase itu menurun menjadi 43,03 persen. Hal ini tentu perlu diwaspadai karena berarti terjadi penurunan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang.

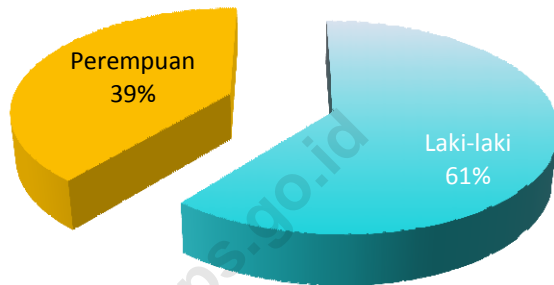
Di kalangan pemerintahan Kota Cimahi sendiri, persentase perempuan sebagai pengambil kebijakan masih jauh dari yang diharapkan. Pada Gambar 3.6 di bawah, jabatan struktural yang diduduki

oleh PNS perempuan hanya 9 persen sementara sebanyak 91 persen sisanya diduduki oleh laki-laki.

Gambar 3.6

Komposisi Struktural PNS Kota Cimahi Menurut Jenis Kelamin, 2012

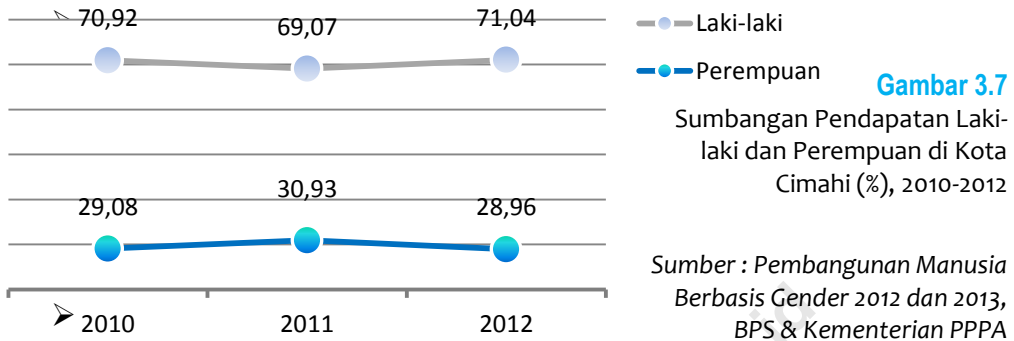
Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Cimahi



Untuk melihat posisi Kota Cimahi di Provinsi Jawa Barat dalam hal peranan perempuan sebagai tenaga manajer, profesional, administrasi dan teknisi, dapat dilihat **Lampiran**. Berbeda dari komponen sebelumnya, pada komponen ini Kota Cimahi tidak termasuk dalam 5 besar kabupaten/kota dengan capaian terbaik. Di sini, kabupaten dengan capaian terbaik adalah Kabupaten Majalengka (47,49 persen). Diikuti Kabupaten Garut (46,81 persen), Kabupaten Ciamis (45,56 persen), Kabupaten Cianjur (45,11 persen), dan Kota Banjar (43,79 persen). Namun demikian, capaian Kota Cimahi ini masih diatas rata-rata yang dicapai Provinsi Jawa Barat sebesar 38,76 persen.

➤ **Sumbangan Perempuan Terhadap Pendapatan**

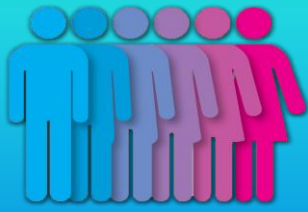
Gambar 3.7 menyajikan perkembangan sumbangan pendapatan dalam pekerjaan di sektor non pertanian baik dari penduduk laki-laki maupun perempuan di Kota Cimahi.



Pada Tahun 2010, perempuan menyumbang 29,08 persen dari seluruh pendapatan pekerja di sektor non pertanian. Nilai ini meningkat sebesar 1,88 persen pada Tahun 2011 menjadi 30,93 persen. Sayangnya, pada Tahun 2012 menurun kembali sebanyak 1,97 persen menjadi 28,96 persen.

Sumbangan pendapatan perempuan ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu peran perempuan dalam angkatan kerja dan upah yang diterima oleh perempuan. Faktor upah, secara nominal setiap tahun selalu mengalami peningkatan baik yang diterima pekerja laki-laki maupun perempuan. Kenaikan upah ini biasanya disebabkan adanya penyesuaian upah nominal yang diterima pekerja sebagai dampak dari biaya kebutuhan hidup yang selalu mengalami kenaikan agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga.

Sementara dari sisi angkatan kerja, berdasarkan data Sakernas angkatan kerja perempuan pada Tahun 2012 adalah sebesar 33,07 persen dari total angkatan kerja di Kota Cimahi. Terlihat bahwa sumbangan perempuan terhadap upah lebih kecil dari sumbangannya terhadap angkatan kerja. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara upah yang diterima perempuan dibandingkan upah yang diterima laki-laki. Penduduk perempuan menerima upah lebih rendah daripada laki-laki.



Disparitas Pembangunan Jender di Kota Cimahi

Stereotip perempuan sebagai makhluk yang lemah dan hanya berkuat pada urusan rumah tangga saja makin lama makin memudar. Hal ini didukung oleh semakin terbukanya peluang perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang pembangunan. Peranan perempuan untuk turut serta di berbagai bidang pembangunan telah diakui dan dihargai. UUD 1945 pun tidak memuat satu kata pun yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Setiap warga negara baik laki-laki maupun perempuan memiliki persamaan hak dan kewajiban untuk menjalankan perannya dalam berbagai bidang kehidupan.

Pada kenyataannya, perempuan masih mengalami ketertinggalan dibandingkan laki-laki pada bidang-bidang seperti pendidikan, ketenagakerjaan, maupun pengambilan keputusan. Namun demikian, pemerintah terus berupaya mendorong keterlibatan perempuan dengan menjadikannya sebagai bagian integral dan tak terpisahkan dalam pembangunan nasional. Upaya-upaya pemerintah ini dilakukan antara lain dengan peningkatan kapabilitas dasar SDM, upaya pengentasan

kemiskinan, peningkatan kualitas dan kemandirian manusia, serta upaya untuk mendorong peran aktif dan swadaya seluruh masyarakat.

Kesenjangan di Bidang Pendidikan

Studi-studi tentang jender saat ini banyak melihat bahwa ketimpangan jender terjadi akibat rendahnya kualitas sumberdaya kaum perempuan sendiri, dan hal tersebut mengakibatkan ketidakmampuan mereka bersaing dengan kaum lelaki. Oleh karena itu upaya-upaya yang dilakukan adalah memperkuat kedudukan kaum perempuan dengan mendidik dan mengajak mereka berperan serta dalam pembangunan.

Pendidikan sesungguhnya adalah upaya sadar seseorang atau masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keterampilan, serta memperluas wawasan. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan kebutuhan jaman. Penduduk dengan kemampuannya sendiri diharapkan dapat meningkatkan partisipasinya dalam berbagai kegiatan, sehingga di masa depan mereka dapat hidup lebih layak. Dengan demikian, pendidikan adalah suatu sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Pendidikan merupakan elemen penting pembangunan dan perkembangan sosial-ekonomi masyarakat. Tidak itu saja, pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat dan bangsa. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, semakin baik kualitas sumber dayanya.

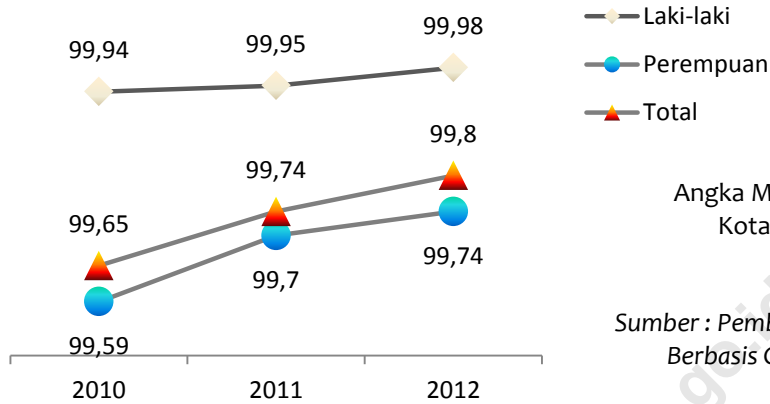
Pendidikan juga menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada ketidak-setaraan jender. Ketidaksetaraan pada sektor pendidikan telah

menjadi faktor utama yang paling berpengaruh terhadap ketidaksetaraan jender secara menyeluruh. Latar belakang pendidikan yang belum setara antara laki-laki dan perempuan akan menjadi faktor penyebab ketidaksetaraan jender dalam semua sektor seperti lapangan pekerjaan, jabatan, peran di masyarakat sampai pada masalah menyuarakan pendapat dan mengambil keputusan.

Di Kota Cimahi sendiri, kondisi masyarakat secara umum dari sisi pendidikan tampaknya relatif cukup baik karena nilai dari beberapa indikator tampak cukup tinggi dan berada di atas nilai indikator Jawa Barat bahkan nasional. Meskipun demikian, selisih yang masih ada antara indikator yang telah dipilah menunjukkan masih adanya kesenjangan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

Kemampuan membaca adalah dasar bagi manusia untuk menjauhkan diri dari kebodohan. Dengan membaca seseorang dapat belajar dari pikiran dan pengalaman orang lain, mengembangkan pikiran dan wawasannya, meningkatkan pengetahuan mengenai berbagai hal yang terjadi di dunia, juga menambah kearifan dalam bersikap. Pendeknya, membaca dan mengetahui banyak hal akan mengembangkan diri seseorang dan memunculkan sikap menghargai terhadap pikiran dan pendapat orang lain. Karena itu, kemampuan membaca mutlak diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesetaraan dalam hubungan laki-laki dan perempuan.

Angka Melek Huruf (AMH) menggambarkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis. Untuk Kota Cimahi, indikator ini menggambarkan kondisi cukup baik karena beberapa tahun terakhir nilai AMH ini berada di atas 99 persen.



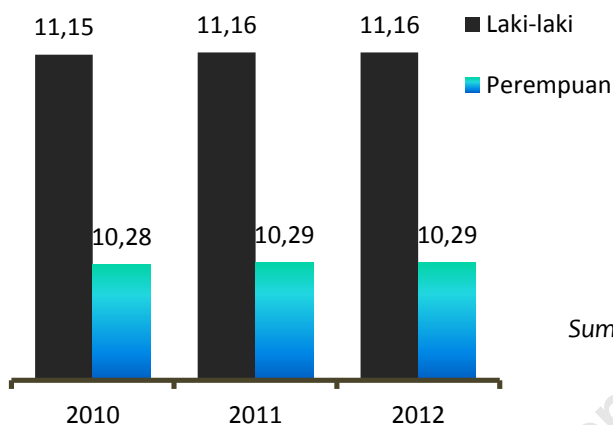
Gambar 4.1

Angka Melek Huruf (AMH)
Kota Cimahi, 2010-2012

Sumber : Pembangunan Manusia
Berbasis Gender 2013, BPS &
Kementerian PP

Gambar 4.1 menyajikan AMH laki-laki dan perempuan untuk periode 2010-2012. Kedua AMH ini terus meningkat, akan tetapi perkembangannya lebih lambat untuk laki-laki daripada perempuan. Dengan demikian, meskipun AMH perempuan masih tetap lebih rendah daripada laki-laki, tetapi perkembangannya lebih menggembarakan. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa kesenjangan AMH antara laki-laki dan perempuan terkikis secara perlahan namun pasti.

Menurut hasil Susenas 2010-2012, rata-rata lama sekolah (RLS) atau panjangnya tahun rata-rata yang dijalani penduduk untuk menyelesaikan pendidikan formal, di Kota Cimahi tidak mengalami banyak perubahan pada kurun waktu tersebut. Demikian juga untuk RLS penduduk perempuan. Pada Tahun 2012 RLS perempuan sebesar 10,29 tahun tidak berubah bila dibandingkan dengan Tahun 2011 (Gambar 4.2). Sedangkan Tahun 2011 RLS perempuan hanya mengalami perubahan sebesar 0,01 poin dari 10,28 tahun pada Tahun 2010. Selisih di antara kedua jenis kelamin ini juga tidak mengalami perubahan yang mengartikan bahwa kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan tidak mengalami perbaikan.



Gambar 4.2
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kota Cimahi, 2012

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2013, BPS & Kementerian PP

Jika membandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat (**Lampiran**), RLS Kota Cimahi relatif telah cukup baik bahkan menempati peringkat keempat setelah Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Bandung. Demikian juga dengan RLS yang terpilah antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan di wilayah Bandung Raya, Kota Cimahi adalah daerah dengan RLS tertinggi baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Prestasi ini tentulah cukup membanggakan.

Tabel 4.1
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya Menurut Jenis Kelamin, 2010-2012

Kab/Kota	Laki-laki			Perempuan		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kab Bandung	9,00	9,01	9,01	8,17	8,18	8,19
Kab Sumedang	8,17	8,18	8,27	7,80	7,81	7,82
Kab Bandung Barat	8,43	8,44	8,45	7,79	7,80	7,81
Kota Bandung	10,83	10,84	10,89	10,08	10,10	10,34
Kota Cimahi	11,15	11,16	11,16	10,28	10,29	10,29
Jawa Barat	8,41	8,42	8,44	7,63	7,64	7,65

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011-2013, BPS RI dan Kemen PP

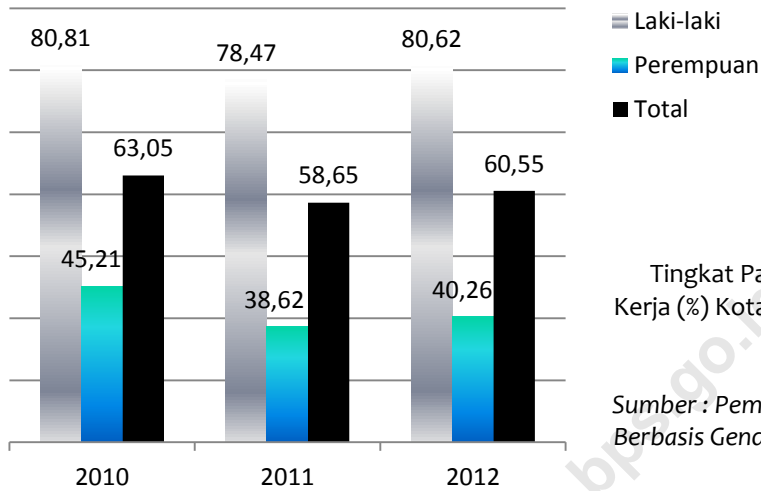
Kesenjangan di Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan merupakan harapan dan tujuan hidup setiap orang. Tingkat kesejahteraan setiap orang dapat berbeda-beda dalam arti keadaan kesejahteraan yang dialami seseorang belum tentu sama bagi orang lain. Namun secara umum kesejahteraan ekonomi dari suatu keluarga biasanya didefinisikan sebagai tingkat kepuasan atau tingkat pemenuhan kebutuhan yang telah diperoleh oleh keluarga.

Sebelumnya terdapat stereotip yang melekat pada perempuan bahwa secara ekonomi peran perempuan adalah menambah penghasilan keluarga. Dalam pandangan budaya tradisional, perempuan lebih cocok mengerjakan peran reproduktif sementara peran produktif lebih cocok dilakukan oleh laki-laki. Akan tetapi dewasa ini, peran perempuan semakin bertambah besar dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan keluarga. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk melihat peranan perempuan saat ini secara ekonomi adalah tingkat partisipasi angkatan kerja, kesempatan kerja dan tingkat pengangguran yang seluruhnya didapatkan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

➤ Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan sedang bekerja atau mencari kerja (menganggur), mereka tergolong penduduk yang aktif secara ekonomi. Sedangkan yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang berusia 15 tahun ke atas dan berstatus bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya sehingga tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi.



Gambar 4.3

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Kota Cimahi, 2010-2012

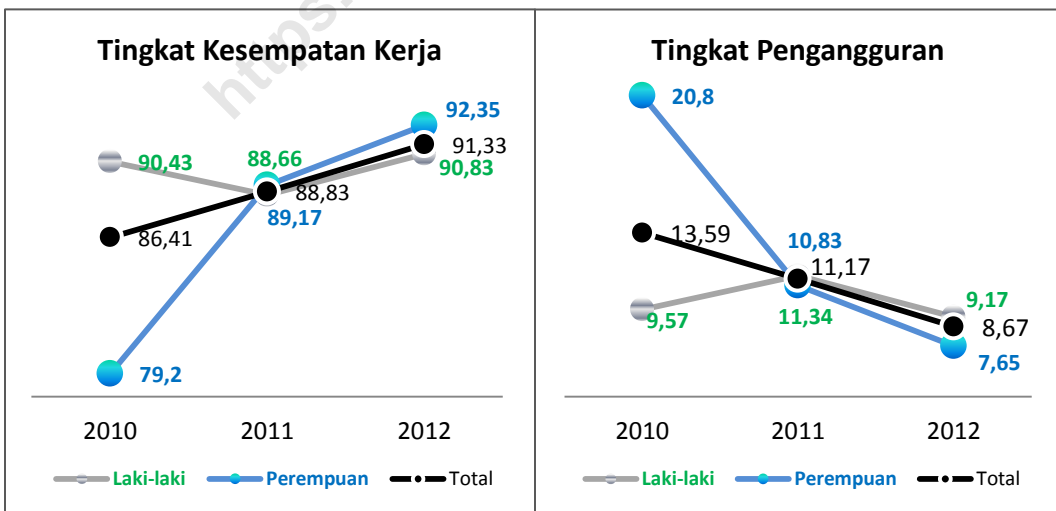
Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011-2013, BPS & Kementerian PPPA

Perbandingan penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas secara keseluruhan menggambarkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Pada Tahun 2012, TPAK penduduk Kota Cimahi adalah 60,55 persen dengan TPAK laki-laki 80,62 persen dan TPAK perempuan 40,26. Disini tampak bahwa partisipasi perempuan dalam angkatan kerja masih sangat rendah dibandingkan laki-laki. Hanya 40,26 persen dari perempuan yang masuk dalam angkatan kerja sedangkan sisanya lebih banyak berada dalam peran domestiknya sebagai pengurus rumah tangga (**Lampiran**).

Pelabelan perempuan sebagai penanggung jawab rumah tangga memang masih sangat kuat. Hal ini membuat perempuan menjadi pihak yang sangat bergantung secara ekonomi kepada laki-laki. Posisi mereka menjadi sangat rapuh karena lemahnya *bargaining power* mereka dalam rumah tangga dan selanjutnya menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga.

➤ **Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran**

Seperti yang kita ketahui, angkatan kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berstatus bekerja maupun mencari pekerjaan. Tingkat kesempatan kerja adalah perbandingan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja terhadap total jumlah angkatan kerja. Angka ini menggambarkan tingkat keberhasilan mendapatkan pekerjaan dalam kelompok penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja. Sejalan dengan itu, tingkat pengangguran, atau secara teknis disebut tingkat pengangguran terbuka, adalah perbandingan jumlah mereka yang sedang mencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengangguran memiliki hubungan yang era. Bila tingkat kesempatan kerja meningkat maka tingkat pengangguran akan turun. Demikian juga sebaliknya.



Gambar 4.4
Tingkat Kesempatan Kerja (%) dan Tingkat Pengangguran Kota Cimahi, 2010-2012

Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2011-2013, BPS & Kementerian PPPA

Terdapat hal yang menarik bila kita memperhatikan Gambar 4.4 dan 4.5. Pada Tahun 2010 terjadi perbedaan yang cukup besar dalam tingkat kesempatan kerja laki-laki dan perempuan. 90,43 persen dari angkatan kerja laki-laki telah berstatus bekerja, hanya 9,57 yang berstatus mencari pekerjaan. Sementara itu, hanya 79,2 persen angkatan kerja perempuan yang berstatus bekerja. Sisanya sebanyak 20,8 persen masih berstatus mencari pekerjaan. Terdapat kesenjangan yang cukup lebar antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan pekerjaan.

Namun pada Tahun 2011 terjadi perubahan yang cukup nyata. Persentase perempuan yang berstatus bekerja naik cukup drastis dan bahkan melebihi persentase laki-laki yang berstatus bekerja. Demikian juga yang terjadi pada Tahun 2012.

Tampaknya telah terjadi pergeseran pandangan bahwa tidak hanya laki-laki, perempuan pun memiliki kemampuan cukup baik bila diberi kesempatan untuk bekerja. Bahkan tenaga kerja perempuan memiliki kelebihan dalam hal ketelitian dan kesabaran.

LAMPIRAN 1.

Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) di Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2010

Kabupaten/Kota	IDJ	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab Bogor	59,05	16,00	35,80	25,84
Kab Sukabumi	58,81	16,00	37,48	25,29
Kab Cianjur	53,96	16,00	43,50	18,24
Kab Bandung	67,15	20,00	35,32	31,10
Kab Garut	60,23	16,00	33,61	30,28
Kab Tasikmalaya	55,65	14,00	38,30	25,52
Kab Ciamis	56,62	8,00	42,01	33,34
Kab Kuningan	55,92	12,00	39,74	27,03
Kab Cirebon	56,96	14,00	36,71	24,21
Kab Majalengka	52,23	10,00	43,25	23,99
Kab Sumedang	62,73	16,00	32,19	32,27
Kab Indramayu	55,14	20,00	34,57	18,65
Kab Subang	48,31	6,00	31,57	27,88
Kab Purwakarta	66,75	20,00	50,09	26,14
Kab Karawang	53,88	12,00	33,06	26,75
Kab Bekasi	54,97	14,00	41,97	24,94
Kab Bandung Barat	69,42	20,00	40,94	32,27
Kota Bogor	62,60	17,78	34,21	27,81
Kota Sukabumi	52,65	10,00	40,06	25,74
Kota Bandung	64,53	18,00	35,58	31,28
Kota Cirebon	53,28	6,90	36,54	29,67
Kota Bekasi	59,19	14,00	37,80	25,59
Kota Depok	77,29	34,00	41,85	30,82
Kota Cimahi	66,15	20,00	43,89	29,08
Kota Tasikmalaya	54,97	6,67	45,63	32,18
Kota Banjar	53,85	12,00	37,65	23,71
Jawa Barat	67,01	24,00	38,01	27,29

LAMPIRAN 2.

Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) di Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2011

Kabupaten/Kota	IDJ	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab Bogor	59,46	16,00	34,69	25,42
Kab Sukabumi	58,29	16,00	34,40	25,55
Kab Cianjur	48,93	16,00	29,38	19,07
Kab Bandung	66,11	20,00	31,58	31,51
Kab Garut	64,68	16,00	54,72	29,03
Kab Tasikmalaya	57,86	14,00	43,03	25,52
Kab Ciamis	57,56	8,00	41,27	32,39
Kab Kuningan	55,91	12,00	36,90	26,66
Kab Cirebon	57,75	14,00	38,80	25,77
Kab Majalengka	52,48	10,00	40,48	23,34
Kab Sumedang	65,14	16,00	36,63	32,79
Kab Indramayu	56,50	20,00	34,17	18,65
Kab Subang	49,80	6,00	34,03	28,26
Kab Purwakarta	64,74	20,00	35,51	26,24
Kab Karawang	58,59	12,00	46,39	25,85
Kab Bekasi	56,81	14,00	43,37	23,14
Kab Bandung Barat	71,03	20,00	45,88	31,72
Kota Bogor	64,75	17,78	37,98	28,47
Kota Sukabumi	53,58	10,00	39,91	25,74
Kota Bandung	65,76	18,00	36,92	31,88
Kota Cirebon	52,37	6,90	33,12	30,01
Kota Bekasi	59,49	14,00	38,21	26,93
Kota Depok	76,37	34,00	35,32	30,82
Kota Cimahi	66,51	20,00	44,25	30,93
Kota Tasikmalaya	50,60	6,67	28,99	30,60
Kota Banjar	55,80	12,00	43,32	24,21
Jawa Barat	68,08	24,00	38,19	27,38

LAMPIRAN 3.

Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ) di Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2012

Kabupaten/Kota	IDJ	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, dan Teknisi (%)	Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kab Bogor	61,35	18,00	34,51	26,04
Kab Sukabumi	56,88	16,00	30,45	25,83
Kab Cianjur	52,65	14,00	45,11	19,09
Kab Bandung	69,64	20,00	39,23	32,01
Kab Garut	65,16	16,00	46,81	29,57
Kab Tasikmalaya	57,79	14,29	39,67	25,69
Kab Ciamis	58,52	8,00	45,56	33,81
Kab Kuningan	58,04	12,00	43,57	27,08
Kab Cirebon	55,87	14,00	32,13	25,16
Kab Majalengka	55,77	12,00	47,49	24,33
Kab Sumedang	62,91	12,24	41,29	33,39
Kab Indramayu	54,84	22,00	27,70	19,54
Kab Subang	51,75	6,00	38,27	28,57
Kab Purwakarta	64,73	24,44	28,77	27,42
Kab Karawang	60,32	14,29	39,97	26,39
Kab Bekasi	54,95	14,00	34,38	23,15
Kab Bandung Barat	68,76	20,83	34,15	32,60
Kota Bogor	66,09	17,78	40,76	28,47
Kota Sukabumi	52,26	10,00	33,57	25,19
Kota Bandung	67,77	18,00	39,78	31,89
Kota Cirebon	52,25	6,67	32,38	30,02
Kota Bekasi	64,69	18,75	39,65	26,94
Kota Depok	79,55	38,00	40,00	31,12
Kota Cimahi	69,28	22,22	43,03	28,96
Kota Tasikmalaya	55,23	6,67	40,17	31,23
Kota Banjar	51,67	8,00	43,79	25,33
Jawa Barat	68,62	24,00	38,76	27,69

LAMPIRAN 4.

Penduduk Kota Cimahi Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan
Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin
Tahun 2010

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	196.812	195.914	392.726
Angkatan Kerja	159.042	88.570	247.612
- Bekerja	143.823	70.147	213.970
- Mencari Kerja	15.219	18.423	33.642
Bukan Angkatan Kerja	37.770	107.344	145.114
- Sekolah	20.907	21.100	42.007
- Mengurus Rumah Tangga	5.037	80.155	85.192
- Lainnya	11.826	6.089	17.915
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK (%) *	80,81	45,21	63,05
Tingkat Kesempatan Kerja –TKK (%) **	90,43	79,20	86,41
Tingkat Pengangguran Terbuka –TPT (%) ***	9,57	20,80	13,59

*) TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

**) TKK adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja

***) TPT adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

LAMPIRAN 5.

Penduduk Kota Cimahi Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan
Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin
Tahun 2011

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	207.896	205.652	413.548
Angkatan Kerja	163.146	79.416	242.562
- Bekerja	144.643	70.815	215.458
- Mencari Kerja	18.503	8.601	27.104
Bukan Angkatan Kerja	44.750	126.236	170.986
- Sekolah	24.236	23.484	47.720
- Mengurus Rumah Tangga	6.853	95.820	102.673
- Lainnya	13.661	6.932	20.593
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK (%) *	78,47	38,62	58,65
Tingkat Kesempatan Kerja -TKK (%) **	88,66	89,17	88,83
Tingkat Pengangguran Terbuka -TPT (%) ***	11,34	10,83	11,17

*) TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

**) TKK adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja

***) TPT adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

LAMPIRAN 6.

Penduduk Kota Cimahi Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan
Seminggu Yang Lalu dan Jenis Kelamin
Tahun 2012

Kegiatan Seminggu Yang Lalu (1)	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (2)	Perempuan (3)	Jumlah (4)
Penduduk Usia Kerja (15 Tahun Ke Atas)	210.966	208.779	419.745
Angkatan Kerja	170.091	84.059	254.150
- Bekerja	154.489	77.630	232.119
- Mencari Kerja	15.602	6.429	22.031
Bukan Angkatan Kerja	40.875	124.720	165.595
- Sekolah	24.921	21.477	46.398
- Mengurus Rumah Tangga	1.945	96.307	98.252
- Lainnya	14.009	6.936	20.945
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja -TPAK (%) *	80,62	40,26	60,55
Tingkat Kesempatan Kerja –TKK (%) **	90,83	92,35	91,33
Tingkat Pengangguran Terbuka –TPT (%) ***	9,17	7,65	8,67

*) TPAK adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

**) TKK adalah proporsi penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja

***) TPT adalah proporsi penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik Kota Cimahi
Jl. Entjep Kartawiria No.20 B Citeureup Cimahi
Telp/Fax: (022) 6645985, e-mail:bps3277@bps.go.id
Home Page: cimahikota.bps.go.id